

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Pengertian Penyelesaian, perselisihan, dan sengketa Pemilu/Pilkada	13
1. Pengertian Penyelesaian.....	13
2. Pengertian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada	14
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	20
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan dan Peradilan Khusus di Indonesia	29

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Bahan Penelitian.....	39
D. Alat Pengumpulan Data	40
E. Lokasi/Tempat Penelitian.....	41
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Dinamika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Sejak Pemilihan Kepala Daerah Diatur Dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 Sampai UU Pilkada No. 1 Tahun 2015.....	43
1. Dinamika mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada	45
2. Dinamika dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada	63
B. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada.....	79
1. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam perspektif kebutuhan hukum (<i>legal requirements</i>).....	81
2. Urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam perspektif kebutuhan kelembagaan (<i>institutional needs factor</i>).....	85
C. Seharusnya Desain Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Pasca Diundangkannya UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia	90
1. Contoh peradilan khusus pemilu di negara lain	91



2. Desain badan peradilan khusus pilkada dalam perspektif system peradilan di Indonesia	100
3. Desain ruang lingkup kewenangan (<i>functie</i>) badan peradilan khusus sebagai peradilan khusus pilkada.....	106
4. Komposisi hakim pada badan peradilan khusus pilkada.....	110
5. Konsepsi hokum acara badan peradilan khusus pilkada	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122